

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Amin Husein Nasution, H. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas: Makassar.
- Amiruddin, H dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. RajaGrafindo Persada: Depok.
- Anisitus Amanat. 2003. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Alwesius. 2022. *Mewaris Berdasarkan Wasiat, Pembuatan, Pelaporan dan Pelaksanaan Wasiat di dalam Praktik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok.
- Dewi Wulansari, C. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama: Bandung.
- Effendi Perangin. 2013. *Hukum Waris*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Eman Suparman. 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Habib Adjie. 2008. *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*. Mandar Maju: Bandung.

- _____. 2012. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. Mandar Maju: Bandung.
- _____. 2022. *Implementasi Peraturan Pendaftaran Tanah Waris oleh Notaris*. Refika Aditama: Bandung.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*. terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia: Bandung.
- Herlien Budiono. 2018. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____. 2018. *Demikianlah Akta Ini*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 2015. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Erlangga: Jakarta.
- I Gusti Ngurah Suwetha, dkk. 2020. *Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Camat di Era Otonomi Daerah dan Perannya Menghadapi Tatanan Kehidupan New Normal*. Pustaka Bangsa: NTB.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni: Bandung.
- Muhammad Usman. 2020. *Wasiat dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Muhtar Said. 2019. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Thafa Media: Yogyakarta.

- Otje Salman S, H.R. dan Mustofa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*. Refika Aditama: Bandung.
- Padma Liman. 2016. *Hukum Waris Pewarisan Ahli Waris Ab-intestato Menurut BW Edisi Revisi*. Pustaka Pena Press: Makassar.
- Paulus Effendie Lotulung. 1994. *Himpungan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (A.A.U.P.B.)*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- _____. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Riduan Syahrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Alumni: Bandung.
- _____. 1998. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sayuti Thalib. 2016. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Subekti, R. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta.
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeven: Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana: Jakarta.

Yahya Harahap, M. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika: Jakarta

Jurnal

Arif Sumeru. 2016. *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Kebijakan Manajemen Publik Volume 4 Nomor 1. Universitas Airlangga.

Cekli Setya Pratiwi, dkk. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Judicial Sector Support Program.

Dola Riza. 2018. *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1.

Fardatul Laili. 2015. *Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Meita Djohan OE. 2018. *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 1.

Muhammad Azhar. 2015. *Relevenasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*. Jurnal Notarius Edisi 9 Nomor 2.

Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan, Winanto Wiryomartani. 2021. *Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus*

Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY). Jurnal Indonesian Notary Volume 3 Nomor 2.

R.M. Henky Wibawa Bambang Pranama, Suhariningsih, Abdul Rachmad Boediono. 2014. *Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Setia Budi Laoepada dan Lilik Pudjiastuti. 2017. *Pertanggungjawaban Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*. Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (Kerjasama Pusat Studi Perizinan).

Sri Hartati. 2019. *Peran Serta Camat Sebagai Pejabat Pemerintah di Kecamatan Guna Melayani Kepentingan Masyarakat Secara Efektif dan Efisien Untuk Mendukung Pemerintahan yang Baik (Good Government)*. Jurnal Spektrum Hukum Volume 16 Nomor 2.

Umar Haris Sanjaya. 2018. *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*. Jurnal Yuridis Volume 5 Nomor 1.

Wahyu Hadis. 2018. *Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Peralihan Hak Tanah Bagi Keturunan Arab di Yogyakarta*. Jurnal Lex Renaissance Volume 3 Nomor 2.

TESIS

Latifah Hanum. 2016. *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputera*. Tesis Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

SUMBER NON HUKUM

Wawancara dengan Lurah AR, pada tanggal 16 Agustus 2022, pada pukul 16.23 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Lurah F, pada tanggal 16 Agustus 2022, pada pukul 14.33 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Lurah RN, pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 12.07 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Lurah TI, pada tanggal 16 Agustus 2022, pada pukul 13.00 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Lurah YH, pada tanggal 18 Agustus 2022, pada pukul 15.31 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Lurah Z, pada tanggal 15 Agustus 2022, pada pukul 10.47 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Camat A, pada tanggal 25 Agustus 2022, pada pukul 15.50 WITA di Kota Makassar.

Wawancara dengan Camat AY, pada tanggal 22 Agustus 2022, pada pukul 09.30 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Camat H secara online, pada tanggal 21 Agustus 2022, pada pukul 11.30 WITA.

Wawancara dengan Camat J, pada tanggal 23 Agustus 2022, pada pukul 11.28 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Camat MA, pada tanggal 19 Agustus 2022, pada pukul 10.55 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Camat S, pada tanggal 15 Agustus 2022, pada pukul 13.40 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Notaris FRP, pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 10.00 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Notaris M, pada tanggal 7 September 2022, pukul 09.45 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Notaris ST, pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 14.35 WITA, di Kabupaten Gowa.

Wawancara dengan Notaris TJT, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 14.30 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Notaris XX, pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 11.00 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Bapak E, Kurator Keperdataan Ahli Madya BHP dan Kurator Kota Makassar, pada tanggal 31 Agustus 2022, pukul 09.12 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Ibu KS, Koordinator Substansi Pemeliharaan Hak Tanah Ruang dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, pada tanggal 5 September 2022, pukul 10.40 WITA, di Kota Makassar.

Octorio Ramiz Parenrengi, dalam Seminar Hasil Penelitian Virginia Ellen Oktania Sie, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, berjudul *“Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, tanggal 25 Januari 2023.*

Habib Adjie. dalam webinar *Bincang Hukum IPPAT Visioner, berjudul “Seluk Beluk Peraturan Menteri ATR/KA BPN Nomor 16 Tahun*

2021 tentang Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanggal 18 Oktober 2021.